

PEMANFAATAN ALOKASI DANA UNTUK MEMAJUKAN USAHA

PERIKANAN DI DESA LUMPUR KABUPATEN GRESIK

(Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan)

JURNAL ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIZKY RADITYA

NIM: 115010101111025



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MEMAJUKAN USAHA
PERIKANAN DI DESA LUMPUR KABUPATEN GRESIK
(Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupten Gresik dan
Desa Lumpur Kecamatan Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan)**

Rizky Raditya, Dr. Moh. Fadli, SH.MHum, Lutfi Effendi, SH.MHum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : radityaduckz@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta dengan adanya tujuan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Daerah seharusnya pemerintah melaksanakan dan memanfaatkan serta mengoptimalkan tujuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa. Yang salah satunya adalah dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang dimana bantuan yang turun di masyarakat Desa Lumpur yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan belum sesuai dengan harapan masyarakat dan belum tepat mengenai sasaran kepada nelayan yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini menandakan bahwa belum tercapainya tujuan Alokasi Dana Desa yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa.

Kata kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Article 2 of the Regulation region of Gresik Regency number 10 in 2009 About the allocation of funds for the village about the village Fund Appropriations intended to finance the implementation of governance and community empowerment, as well as with the purpose of allocation of funds for the village in Peraturan Region Government should implement and utilize and optimize the purposes for which it is set up in the applicable local Gresik number 10 in 2009 About the allocation of funds for the village. One of which is the allocation of Funds utilization of Village in the village

of Mud Gresik which help the villagers down in the mud, mostly as fishermen livelihood-eyed yet according to the expectations of the community and not the bull's-eye to the fishermen who do require such assistance. This indicates that the goal has not yet been allocation of funds already set up village dala local regulations Took Gresik number 10 in 2009 about the allocation of funds for the village.

Keywords: applicable local County Gresik number 10 in 2009 About the allocation of funds for Village

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 9.634 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU-11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Yang sebagian orangnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan kehidupan mereka bersumber pada laut, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.¹

Salah salah satu provinsi yang begitu potensial di bidang perikanan adalah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik. Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Timur, Ibu kota Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya, dengan luas

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_pulau_di_Indonesia diakses pada tanggal 10 Desember 2014

wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa.²

Dengan demikian kabupaten Gresik berpotensi besar disektor perikananannya, sektor perikanan di Kabupaten Gresik tidak akan maju tanpa campur tangan pemerintah. masyarakat setempat dan dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa menyatakan ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3 menjelaskan dari tujuan alokasi dana desa antara lain:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran, pembangunan ditingkat desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik diakses pada tanggal 04 Desember 2014.

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.”

Adanya tujuan alokasi dana desa dalam peraturan daerah diatas, seharusnya pemerintah melaksanakan dan mengoptimalkan setiap tujuan yang sudah diatur. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik khususnya masyarakat Desa Lumpur masuk dalam masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Bantuan yang diberikan pemerintah bukan hanya berupa dana dan fasilitas tempat tetapi juga berupa bantuan peralatan. Pemerintah mengalokasikan Alokasi Dana Desa untuk Desa Lumpur sebesar Rp. 114.000.000,00 per tahun untuk memberikan bantuan berupa peralatan tersebut. Yang dimaksud peralatan seperti *cool box*, jaring sebagai alat tangkap ikan. Akan tetapi dalam kenyataan semua bantuan tersebut tidak semuanya sampai ke masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, walaupun sampai tidak langsung kemasyarakatnya melainkan ketengkulak atau juragan yang memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah, tengkulak atau juragan tersebut bukan masyarakat asli Gresik melainkan investor-investor yang memanfaatkan tenaga masyarakat nelayan Desa Lumpur saja. Adapapun pemerintah memberikan bantuan berupa mesin alat pembuat krupuk ikan, akan tetapi alat tersebut tidak dapat digunakan karena masyarakat tidak bisa mengoperasikan alat tersebut dan lebih memilih kealat tradisional. Jadi alat tersebut hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut bantuan yang di berikan pemerintah belum mengenai sasaran, Sehingga masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik tidak ikut merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Isu Hukum

berdasarkan pada uraian diatas, terdapat sebuah isu hukum yang perlu dilakukan sebuah penelitian yaitu:

1. Apa saja bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupten Gresik?
3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberian bantuan untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik?

Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, penelitian ini menekankan kejadian atau peristiwa dilapangan secara langsung dan diperoleh dari hasil penelitian yang berdasarkan metode ilmiah dan berpedoman pada teori hukum serta perundang-undangan yang digunakan. Pada metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis yang dilakukan mempelajari peristiwa dan kejadian yang terjadi didalam lapangan dengan cara meneliti pemanfaatan alokasi dana untuk memajukan usaha perikanan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Adanya data yang didapat lalu kemudian dikaji apa saja alokasi dana yang diberikan pemerintah daerah lalu bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data yang didapatkan melalui kegiatan penelitian lapang yang bersumber dari wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Koperasi Unit Desa Lumpur Kabupaten Gresik serta Kepala Kelompok Nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan “Pemanfaatan Alokasi Dana Untuk Memajukan Usaha Perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik (Studi di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik).”

1. Bahan hukum primer, diambil dari bahan yang memiliki nilai yuridis sebagai acuan penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 - d. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/MEN/2012.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.
2. Bahan hukum sekunder diambil dari data yang tekstual, audio, visual, hasil-hasil penelitian, literatur dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier diambil dari internet, website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Hasil penelitian

A. Jenis Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Memajukan Usaha Perikanan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Desa Lumpur Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, jumlah penduduk Desa Lumpur berjumlah 6907 jiwa dan sebagian besar penduduk nelayannya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik pemerintah juga sudah memberikan bantuan bukan hanya berupa uang melainkan dalam bentuk barang, pemerintah memang seharusnya peduli dengan keadaan nelayan di Desa Lumpur. Bantuan yang di berikan oleh pemerintah antara lain alat pembuat krupuk ikan, jaring, *cool box* (tempat penyimpanan ikan) dan alat transportasi penangkapan ikan di laut. Pemberian yang diberikan pemerintah bukan hanya barang, melainkan pembangunan fisik yang dilakukan dibeberapa tempat seperti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pendopo (tempat perkumpulan nelayan) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah juga memberikan pinjaman berupa uang yang bertujuan memberikan modal kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur untuk lebih memajukan usaha perikananannya. Namun, masyarakat menganggap bahwa pinjaman yang diberikan pemerintah daerah tidak untuk dikembalikan. Dengan adanya peristiwa tersebut pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan berupa uang dikarenakan masyarakat telah menyalahgunakan bantuan tersebut.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai program yang bertema Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan pada tahun 2014, kegiatannya adalah peningkatan mutu hasil perikanan

yang dianggarkan sebanyak Rp. 631.160.000. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam program ini berupa 231 *cool box* yang dibagikan dalam 7 Kecamatan di Kabupaten Gresik dan Desa Lumpur Kabupaten Gresik hanya mendapatkan 5 unit *cool box*. Namun *cool box* yang diberikan pemerintah daerah tidak turun langsung kepada masyarakat, melainkan turun ke juragan atau tengkulak.³

Adanya pemberian bantuan berbeda yang di berikan pemerintah daerah kepada setiap desa bertentangan dengan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa azas merata dan adil dalam pembagian Alokasi Dana Desa, di Desa lumpur Kabupaten Gresik juga sangat membutuhkan bantuan berupa alat transportasi yang di karenakan Masyarakat Desa Lumpur sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, dan menurut peneliti Desa Lumpur juga sangat membutuhkan bantuan dikarenakan kurangnya alat transportasi dalam penangkapan ikan dilaut, bukan hanya itu kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Gresik sebanyak 5 kelompok yang berjumlah terdiri dari 1953 orang.⁴ Adapun bantuan berupa alat pembuat krupuk ikan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur untuk memajukan usaha perikanan Desa Lumpur, akan tetapi semua bantuan tersebut tidak dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat Desa Lumpur, dikarenakan masyarakat Desa Lumpur masih banyak yang menggunakan alat tradisional. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan alat modern yang masyarakat Desa Lumpur belum paham pasti tentang tata cara penggunaan alat modern tersebut, sehingga saat ini alat yang diberikan pemerintah tidak dapat

³ Data yang diambil dari Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Perternakan pada tanggal 12 desember 2014

⁴ Data Primer, Diolah, 2015

dimanfaatkan dengan baik. Dengan mayoritas masyarakat di Desa Lumpur bermata pencaharian sebagai nelayan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan menurunkan bantuan yang sesuai dengan porsinya.

B. Upaya dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Program dari Pemerintah belum semuanya berjalan dengan lancar, Pada saat Peneliti melakukan Survey kepada salah satu ketua nelayan Bapak Ismail Program pembinaan dan pelatihan nelayan belum terealisasikan serta bantuan berupa jaring pun belum di terima oleh para kelompok nelayan yang semestinya pada program dari pemerintah jaring sudah diturunkan kepada nelayan tetapi nelayan mengaku jaring yang mereka gunakan adalah buatan mereka sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah.⁵

Bantuan yang di berikan belum merata termasuk desa Lumpur belum mendapatkan porsi yang sesuai, di mana di Desa Lumpur berdasarkan Bapak Ismail sebagai Ketua nelayan Desa Lumpur hanya dibagikan 5 coolbox yang sarannya pun tidak tepat bukan diberikan kepada nelayan melainkan kepada tengkulak atau juragan yang memang sudah tidak membutuhkan, sedangkan nelayan yang membutuhkan pun tidak mendapat bantuan coolbox tersebut. Adapun bantuan perahu yang masyarakat Desa Lumpur sangat membutuhkan akan tetapi Desa Lumpur tidak mendapatkan bantuan tersebut.⁶ Pemerintah Kabupaten belum mengupayakan bantuan yang merata dan sesuai dengan porsinya yang upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bisa dibilang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

⁵ Hasil wawancara Survey oleh Bapak Ismail Ketua Nelayan, pada tanggal 12 November 2014.

⁶ Hasil wawancara Survey oleh Bapak Ismail Ketua Nelayan, pada tanggal 12 November 2014.

Adanya Hambatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemberian bantuan serta program yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Dari Pemerintah

kurangnya koordinasi dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang sehingga lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang tidak dapat mengetahui kebutuhan dimasyarakat Nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, yang berakibat bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan juga Pemerintah harusnya bersikap aktif dan tidak pasif dalam memberikan bantuan agar bantuan yang diturunkan dapat memenuhi sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

2. Dari Masyarakat

kurangnya pengetahuan yang memang mayoritas masyarakat Desa Lumpur memiliki riwayat pendidikan yang terbilang cukup rendah, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap bantuan dari Pemerintah terlebih lagi bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat modern yang masyarakat Desa Lumpur tidak dapat menggunakannya yang sering kali masyarakat Desa Lumpur masih menggunakan peralatan yang Tradisional.

Terdapat beberapa Faktor-faktor sedikitnya Alokasi Dana Desa yang diturunkan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang sehingga menyebabkan bantuan dari pemerintah daerah belum mengenai sasaran yang tepat dan tidak memenuhi porsi yang seharusnya. Sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang semestinya:

1. Minimnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor perikanan

2. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gresik kepada
3. Kurangnya Koordinasi Pemerintah kecamatan dan kabupaten serta
4. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik
5. Produk di desa Lumpur kurang menjual

C. Solusi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemberian Alokasi Dana Desa dalam pemberian bantuan untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Menurut pendapat Bapak sunawa dibidang program dan pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik, Usaha yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan diatas, yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik harus sering melakukan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik ssehingga bantuan yang turun pun dapat tepat mengenai sasaran.
2. Adanya komunikasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan dalam memberikan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.
3. Adanya sanksi yang tegas untuk pihak dari Pemerintah dan Masyarakatnya jika bantuan yang telah diturunkan tidak sesuai atau masyarakatnya sendiri yang menyalahgunakan bantuan tersebut.

Penulis berpendapat mengenai solusi yang harus dilakukan pemerintah agar Alokasi Dana Desa yang turun dapat dimanfaatkan dengan baik:

1. Nelayan Desa Lumpur harusnya juga memberi kontribusi untuk memajukan usaha perikanan dengan adanya koordinasi antara masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan Produk-produk unggulan yang tercipta dari usaha perikanan Desa Lumpur.
2. Adanya penyuluhan yang mampu membuat masyarakat nelayan Desa Lumpur menyadari adanya hukum yang berlaku, agar tidak terjadi miss komunikasi seperti peminjaman modal yang tidak dikembalikan.
3. Harusnya pemerintah juga aktif dalam sosialisasi dengan Nelayan Desa Lumpur di karenakan mayoritas masyarakat Desa Lumpur bermatapencaharian sebagai nelayan, dengan memajukan usaha perikanan Desa Lumpur maka pembangunan Desa pun akan ikut berkembang.

3. Penutup

Kesimpulan

1. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik antara lain alat pembuat kerupuk, jaring, *cool box* (tempat penyimpanan ikan) dan juga berupa pinjaman berupa uang yang bertujuan memberikan modal kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik untuk memajukan usaha perikananannya. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Gresik belum dapat mengoptimalkan pemeberian bantuan tersebut, hal itu terjadi karena bantuan yang turun tidak tepat pada sasaran yang dituju. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memberikan bantuan *cool box* (tempat penyimpanan ikan) tidak kepada nelayan yang memang

seharusnya menerimanya akan tetapi yang menerima adalah juragan atau tengkulak ikan yang berada di Desa Lumpur Kabupaten Gresik dan hanya berjumlah 5 buah saja. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pun kurang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberian pembuat kerupuk ikan serta peminjaman uang sebagai modal usaha yang mengakibatkan terjadinya miss komunikasi antara masyarakat Desa Lumpur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, yang pada akhirnya alat pembuat kerupuk ikan tidak dapat dipakai dengan maksimal dikarenakan penggunaannya yang termasuk alat modern sedangkan masyarakat nelayan Desa Lumpur masih menggunakan alat tradisional.

2. Hambatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemeberian bantuan serta program yang dilakukan pemerintah, yaitu:
 - a. Dari Pemerintah yaitu kurangnya koordinasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang sehingga lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang tidak dapat mengetahui kebutuhan dimasyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang berakibat bantuan yang di berikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
 - b. Dari Masyarakat yaitu disebabkan mayoritas penduduk Desa Lumpur Kabupaten Gresik memiliki riwayat pendidikan yang cukup rendah, yang mayoritas penduduknya yang tamat sekolah pda jenjang SMP dan SMA sangat dominan. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang berupa alat modern belum bisa digunakan dengan baik karena kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.
3. Usaha yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan, solusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah harus meningkatkan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik

dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus menjalin komunikasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perternakan dalam memberikan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

A. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus menurunkan bantuan langsung kepada nelayan yang memang menjadi sasaran utama bukan kepada juragan atau tengkulak yang sudah kaya tetapi masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hendaknya Pemerintah Kabupaten dalam membuat suatu kebijakan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa harusnya menggunakan prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan Alokasi Dana Desa yang turun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, di karenakan Pemerintah daerah masih belum menganut prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik karena jumlah Alokasi Dana Desa yang turun di Desa Lumpur Kabupaten Gresik belum sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
2. Kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik khususnya di Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang selama ini kurang mendapatkan simpati dan kurangnya bantuan yang ada seharusnya meningkatkan perannya dalam menyelenggarakan pembangunan Desa Lumpur di sektor perikanan yang mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan, dan meningkatkan penyuluhan serta lebih dekat kepada masyarakat agar tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Sehingga Alokasi Dana Desa yang

turun pun akan jelas dan dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

3. Pemerintah Kabupaten Gresik harusnya membuat pelatihan yang bisa mencerdaskan masyarakat Desa Lumpur yang benar-benar efektif dan dapat membuat masyarakat Desa Lumpur bergerak sehingga dapat mewujudkan produk-produk unggulan yang bisa memajukan Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Jika Desa Lumpur Kabupaten Gresik memiliki produk unggulan yang tidak pernah ada sebelumnya di desa-desa lain maka pendapatan desa pun akan bertambah, akan tetapi itu semua dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik dengan cara berkomunikasi yang baik serta adanya tanggungjawab dan keinginan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikanannya.